

BAB II

WILAYAH KOTA SURAKARTA DAN PEMILU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SURAKARTA

Pada bab ini disajikan data-data mengenai gambaran umum dari objek penelitian. Gambaran umum objek penelitian berfungsi untuk memberi keterangan lebih dalam dan akurat mengenai kondisi objek yang hendak diteliti. Gambaran umum dalam penelitian ini meliputi Kota Surakarta sebagai wilayah atau objek yang diteliti dan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta sebagai pihak penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta pada Tahun 2015. Gambaran umum objek penelitian ini dapat terdiri atas kondisi geografis, sejarah, pemerintahan, kependudukan, pendidikan, kesehatan, transportasi, pariwisata, atau data-data lain yang mendukung. Penjelasan mengenai gambaran umum objek penelitian dapat data disimak berikut ini:

2.1. Gambaran Umum Wilayah Kota Surakarta

2.1.1. Kondisi Geografis

Secara geografis Kota Surakarta dengan luas wilayah kurang lebih 44 Km² berada pada cekungan di antara dua gunung, yaitu Gunung Lawu dan Gunung Merapi dan di bagian timur dan selatan dibatasi oleh Sungai Bengawan Solo. Dilihat dari aspek lalu lintas perhubungan di Pulau Jawa, posisi Kota Surakarta tersebut berada pada jalur strategis yaitu pertemuan atau simpul yang menghubungkan Semarang dengan Yogyakarta dan jalur Surabaya dengan

Yogyakarta. Dengan posisi yang strategis ini, tidak heran Kota Surakarta menjadi pusat bisnis yang penting bagi daerah kabupaten di sekitarnya.

Gambar 2.1
Peta Wilayah Kota Surakarta



Kota Surakarta dikelilingi oleh 3 (tiga) kabupaten. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar dan Boyolali, sebelah Timur dibatasi dengan Kabupaten Sukoharjo dan Karanganyar, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo, dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo dan Karanganyar. Kota Surakarta terdiri dari 5 (lima) wilayah kecamatan, yaitu Kecamatan Laweyan, Serengan, Pasarkliwon, Jebres dan Banjarsari. Dari kelima kecamatan ini, terbagi menjadi 51 kelurahan, 595 Rukun Warga (RW) dan 2669 Rukun Tetangga (RT).²⁵

²⁵ "Kota Surakarta" - http://id.m.wikipedia.org/wiki/Kota_Surakarta. Diunduh 2 Juni 2017. Pukul 08.14 WIB.

2.1.2. Sejarah

Kota Surakarta pada mulanya adalah wilayah kerajaan Mataram. Kota ini bahkan pernah menjadi pusat pemerintahan Mataram. Pada tahun 1742, orang-orang Tionghoa memberontak dan melawan kekuasaan Pakubuwana II, raja Kesultanan Mataram, yang bertahta di Kartasura sehingga Keraton Kartasura hancur dan Pakubuwana II menyingkir ke Ponorogo, Jawa Timur. Dengan Bantuan VOC pemberontakan tersebut berhasil ditumpas dan Kartasura berhasil direbut kembali.

Sebagai ganti ibukota kerajaan yang telah hancur maka Sunan Pakubuwana II memerintahkan Tumenggung Honggowongso dan Tumenggung Mangkuyudo serta Komandan pasukan Belanda J.A.B Van Hohenndorff untuk mencari lokasi ibukota kerajaan Mataram Islam yang baru. Setelah mempertimbangkan faktor fisik dan non-fisik akhirnya terpilih suatu desa di tepi Sungai Bengawan Solo yang bernama Desa Sala. Sejak saat itu Desa Sala berubah menjadi Keraton Surakarta Hadiningrat²⁶ yang mulai ditempati tanggal 17 Februari 1745 dan terus berkembang pesat. Peristiwa ini kemudian dianggap sebagai titik awal didirikannya Keraton Kasunanan Surakarta dan tanggal 17 Februari ditetapkan sebagai hari jadi Kota Surakarta.

²⁶ Pemberian nama Surakarta Hadiningrat memiliki arti berarti harapan akan terciptanya negara yang tata tentrem karta raharja (teratur, tertib, aman, dan damai), serta harus disertai dengan tekad dan keberanian menghadapi segala rintangan yang menghadang (Sura) untuk mewujudkan kehidupan dunia yang indah (Hadiningrat). Sejarah nama kota Solo sendiri dikarenakan daerah ini dahulu banyak ditumbuhi tanaman pohon Sala (sejenis pohon pinus) seperti yang tertulis dalam serat Babad Sengkala yang disimpan di Sana Budaya Yogyakarta. Sala berasal dari bahasa Jawa asli (lafal bahasa jawa: Solo) yang pada akhirnya orang-orang mengenalnya dengan nama Kota Solo.

Pada tanggal 13 Februari 1755 dibuat suatu perjanjian yang ditandatangani oleh Sunan Pakubuwana III, Pangeran Mangkubumi dan Belanda yaitu Perjanjian Giyanti yang menyebabkan Mataram Islam terpecah karena propaganda kolonialisme Belanda. Dalam Perjanjian Giyanti terjadi pemecahan pusat pemerintahan menjadi dua yaitu pusat pemerintahan di Surakarta dan Yogyakarta. Selanjutnya wilayah Kasunanan Surakarta semakin berkurang dengan adanya Perjanjian Salatiga pada tanggal 17 Maret 1757 dimana Pemerintahan di Surakarta terpecah menjadi Kasunanan dan Mangkunegaran. Raden Mas Said diakui sebagai seorang pangeran merdeka dengan wilayah kekuasaan berstatus kadipaten, yang disebut dengan nama Praja Mangkunegaran. Sebagai penguasa Mangkunegaran, Raden Mas Said bergelar Adipati Mangkunegaran I.²⁷

Kekuasaan politik kedua kerajaan ini dilikuidasi setelah berdirinya Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Selama 10 bulan, Surakarta berstatus sebagai daerah istimewa setingkat provinsi, yang dikenal sebagai Daerah Istimewa Surakarta. Selanjutnya, karena berkembang gerakan antimonarki di Surakarta serta kerusuhan, penculikan, dan pembunuhan pejabat-pejabat DIS, pada tanggal 16 Juni 1946 pemerintah membubarkan DIS dan menghilangkan kekuasaan raja-raja Kasunanan dan Mangkunegaran. Status Susuhunan Surakarta dan Adipati Mangkunegaran menjadi rakyat biasa di masyarakat dan keraton diubah menjadi pusat pengembangan seni dan budaya Jawa.

²⁷ “Sejarah Singkat Kota Solo” – <http://tentangsolo.web.id/sejarah-singkat-kota-solo.html>. Diunduh 2 Juni 2017. Pukul 09.00 WIB.

Pada tanggal 16 Juni 1946 diperingati sebagai hari jadi Pemerintahan Kota Surakarta era modern. Surakarta ditetapkan menjadi tempat kedudukan dari residen, yang memimpin Karesidenan Surakarta. Setelah Karesidenan Surakarta dihapus pada tanggal 4 Juli 1950, Surakarta menjadi kota dibawah administrasi Provinsi Jawa Tengah. Semenjak berlakunya Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang memberikan banyak hak otonom bagi pemerintahan daerah, Surakarta menjadi daerah berstatus kota otonom.²⁸

2.1.3. Pemerintahan

2.1.3.1. Sejarah

Secara *de facto* pada tanggal 16 Juni 1946 terbentuk Pemerintah Daerah Kota Surakarta yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, sekaligus menghapus kekuasaan Kerajaan Kasunanan dan Mangkunegaran. Secara yuridis Kota Surakarta terbentuk berdasarkan Penetapan Pemerintah Tahun 1946 Nomor 16/SD, yang diumumkan pada tanggal 15 Juli. Dengan berbagai pertimbangan faktor-faktor historis sebelumnya, tanggal 16 Juni 1946 ditetapkan sebagai hari jadi Pemerintah Kota Surakarta.²⁹

Perkembangan Pemerintah Kota Surakarta dimulai dengan periode Pemerintah Daerah Surakarta pada tanggal 16 Juni 1946 sampai berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1947. Periode kedua yaitu periode Pemerintah Harminte Surakarta, berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1947 sampai berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948. Periode ketiga kembali pada

²⁸ “Kota Surakarta”... *op. cit.*

²⁹ “Sejarah Pemerintahan” - <http://surakarta.go.id/konten/sejarah-pemerintahan>. Diunduh 7 Maret 2017. Pukul 09.18 WIB.

Pemerintah Daerah Surakarta dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 sampai berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957.

Pada periode keempat yaitu Pemerintah Daerah Kotapraja Surakarta, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 sampai berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965. Periode kelima Pemerintah Kotamadya Surakarta, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 sampai dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Periode selanjutnya yaitu Pemerintah Kota Surakarta, berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, sampai sekarang.

Untuk Walikota/Kepala Daerah yang pernah menjabat Di Surakarta, setidaknya sudah ada 14 Walikota yang telah menjabat hingga sekarang. Pada periode pertama dijabat oleh Mr. Iskaq Tjokrohadisoerjo (15 Juli 1946 s.d. 14 November 1946). Periode kedua oleh Sjamsoeridjal (14 November 1946 s.d. 13 Januari 1949). Periode ketiga oleh Soedjatmo Soemowerdojo (24 Januari 1949 s.d. 1 Mei 1950). Periode keempat oleh Soeharjo Soerjo Pranoto (Juni 1949 s.d. 1 Mei 1950). Periode kelima oleh K. Ng. Soebekti Poesponoto (1 Mei 1950 s.d. 1 Agustus 1951).

Periode keenam oleh Muhammad Saleh Werdisastro (1 Agustus 1951 s.d. 1 Oktober 1955 dan s.d. 17 Pebruari 1958). Periode ketujuh oleh Oetomo Ramelan (17 Pebruari 1958 s.d. 23 Oktober 1965). Periode kedelapan oleh Th. J. Soemantha (23 Oktober 1965 s.d. 11 Januari 1968). Periode kesembilan oleh R.

Koesnandar (1968 s.d. 1975). Periode kesepuluh oleh Soemari Wongsopawiro (1975 s.d. 1980).

Selanjutnya periode kesebelas oleh Soekatmo Prawirohadisebroto, SH (1980 s.d. 1985). Periode kedua belas oleh H.R. Hartomo (1985 s.d. 1995). Periode ketiga belas oleh Imam Soetopo (1995 s.d. 2000). Periode keempat belas oleh Slamet Suryanto (2000 s.d. 2005). Periode kelima belas oleh Ir. H. Joko Widodo (2005 s.d. Oktober 2012). Dan periode keenam belas oleh F.X. Hadi Rudyatmo (Oktober 2012 s.d. sekarang).

2.1.3.2. Kecamatan

Kecamatan merupakan pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kabupaten atau kota. Kecamatan terdiri atas desa-desa atau kelurahan-kelurahan. Di Kota Surakarta sendiri terdapat 5 kecamatan yaitu Kecamatan Laweyan, Kecamatan Serengan, Kecamatan Pasarkliwon, Kecamatan Jebres, dan Kecamatan Banjarsari.

Tabel 2.1
Kecamatan yang ada di Kota Surakarta

Kecamatan	Alamat	No. Telpn	Jumlah Kelurahan
Laweyan	Jl. Utama Bone 35 Rt. 03/VI Banyuanyar	0271-714568	11 Kelurahan
Serengan	Jl. Veteran No. 271 Surakarta	0271-645414	7 Kelurahan
Pasarkliwon	Jl. Kapt. Mulyadi 110 Surakarta	0271-656842	9 Kelurahan
Jebres	JL. Kihajar Dewantara no. 27 Surakarta	0271-656961	11 Kelurahan
Banjarsari	Jl. Letjen S. Parman 133 Surakarta	0271-740775	13 Kelurahan

Sumber: Data Strategis Kota Surakarta, (2017)

Kecamatan memiliki tugas pokok menyelenggarakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan dari Walikota untuk menangani

sebagian urusan otonomi daerah. Sedangkan fungsi kecamatan adalah penyelenggaraan kesekretariatan Kelurahan; mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; pelaksanaan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan; mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan; mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan; membina penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan; melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan di pemerintahan Kelurahan; dan pembinaan jabatan fungsional.

2.1.3.3. Kelurahan

Kelurahan merupakan pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan. Di Kota Surakarta sendiri terdapat 51 kelurahan. Untuk tugas pokok kelurahan adalah menyelenggarakan sebagian kewenangan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota. Sedangkan fungsi kelurahan adalah penyelenggaraan kesekretariatan Kelurahan; pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan; pemberdayaan masyarakat; pelayanan masyarakat; penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; pemeliharaan prasarana, fasilitas umum dan lingkungan hidup; pembinaan lembaga kemasyarakatan; dan pembinaan jabatan fungsional.

2.1.4. Kependudukan

Jumlah penduduk Kota Surakarta pada tahun 2013 adalah 563.659 jiwa, terdiri dari 278.644 laki-laki dan 285.015 perempuan. Rasio jenis kelamin Kota Surakarta 97,76 persen, ini menunjukkan bahwa penduduk laki-laki lebih sedikit dibandingkan dengan penduduk perempuan. Jika dikaitkan dengan kelompok umur nampak bahwa proporsi penduduk perempuan yang lebih besar berada pada kelompok-kelompok umur tua. Sehingga untuk perencanaan pembangunan kependudukan di bidang kesehatan, kelompok manula perempuan ini menjadi penting mengingat pada umumnya manula perempuan lebih tidak sejahtera dibandingkan dengan manula laki-laki.

Penduduk terbesar berada di Kecamatan Banjarsari yaitu 178.397 jiwa dan terkecil di Kecamatan Serengan dengan jumlah 52.998 jiwa. Kepadatan penduduk cukup tinggi yaitu mencapai 12.799 jiwa/km², sehingga jika laju pertambahan penduduk tidak dikendalikan, maka Kota Surakarta akan menjadi semakin padat. Angka ketergantungan penduduknya sebesar 41,73 persen. Jumlah penduduk tahun 2013 sebesar 563.659 jiwa jika dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2012 sebesar 545.653 jiwa maka mengalami pertambahan sebesar 18.006 jiwa dalam 1 (satu) tahun yaitu dari akhir Bulan Desember 2012 sampai Bulan Desember 2013. Jadi pertambahan penduduk Kota Surakarta adalah 3,25 persen. Berikut akan disajikan data komposisi penduduk Kota Surakarta dari beberapa aspek.

2.1.4.1. Penduduk Menurut Karakteristik Demografi

A. Jumlah dan Proporsi Penduduk menurut Umur dan Jenis Kelamin

Karakteristik penduduk menurut umur dan jenis kelamin berguna dalam membantu menyusun perencanaan pemenuhan kebutuhan dasar bagi penduduk sesuai dengan kebutuhan kelompok umur masing-masing, baik kebutuhan pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan lain sebagainya.³⁰

Tabel 2.2
Jumlah dan Proporsi Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, Kota Surakarta, Tahun 2013

Kelompok Umur	Laki-laki		Perempuan		L+P	
	n (jiwa)	%	n (jiwa)	%	n (jiwa)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
0-4	19.816	7,11	18.945	6,65	38.761	6,88
5-9	22.726	8,16	21.208	7,44	43.934	7,79
10-14	23.089	8,29	22.277	7,82	45.366	8,05
15-19	22.139	7,95	21.179	7,43	43.318	7,69
20-24	20.779	7,46	20.109	7,06	40.888	7,25
25-29	21.655	7,77	21.644	7,59	43.299	7,68
30-34	25.585	9,18	25.432	8,92	51.017	9,05
35-39	23.246	8,34	23.365	8,20	46.611	8,27
40-44	21.418	7,69	22.291	7,82	43.709	7,75
45-49	19.594	7,03	21.254	7,46	40.848	7,25
50-54	17.585	6,31	19.350	6,79	36.935	6,55
55-59	14.522	5,21	15.350	5,39	29.872	5,30
60-64	10.462	3,75	10.729	3,76	21.191	3,76
65-69	5.970	2,14	7.267	2,55	13.237	2,35
70-74	4.559	1,64	6.037	2,12	10.596	1,88
>75	5.499	1,97	8.578	3,01	14.077	2,50
Jumlah	278.644	100,00	285.015	100,00	563.659	100,00

Sumber: Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, (2013)

Tabel 2.3 menunjukkan bahwa penduduk Kota Surakarta sebagian besar merupakan penduduk usia produktif yaitu pada kelompok umur antara 15-64 tahun (70,55 persen) dengan komposisi terbesar berada pada penduduk berumur 30-39 tahun. Demikian pula dengan komposisi penduduk berdasarkan jenis

³⁰ "Demografi Penduduk" - <http://dispdukcapil.surakarta.go.id/20XIV/index.php/en/2014-05-21-04-43-06/2014-05-21-08-47-11/kuantitas-penduduki/item/66-penduduk-demografi>. Diunduh 7 Maret 2017. Pukul 10.36 WIB.

kelamin, nampak bahwa baik penduduk laki-laki maupun perempuan yang terbesar berada pada kelompok umur 30-39 tahun. Kondisi ini sangat menguntungkan karena sebagian besar (di atas 70 persen) merupakan penduduk usia kerja (usia produktif), dan sisanya sebanyak 22,72 persen merupakan penduduk usia muda (berusia dibawah 15 tahun) dan 6,73 persen merupakan penduduk lanjut usia (65 tahun ke atas).

Penduduk berusia kurang dari 15 tahun cukup besar pula yaitu lebih dari seperlima penduduk Kota Surakarta (22,72 persen). Hal ini harus menjadi perhatian karena 5 tahun mendatang kelompok ini akan menjadi entry tenaga kerja baru, yang memerlukan skill dan kualitas SDM yang memadai baik ketrampilan maupun etos kerja dan kepribadian. Disisi yang lain pemerintah Kota Surakarta harus mampu pula menciptakan pasar kerja yang dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak lagi.

B. Proporsi Penduduk Penyandang Cacat

Tabel 2.3
Angka Penyandang Cacat, Kota Surakarta, Tahun 2013

Kelompok Umur	Penduduk Penyandang Cacat			Jumlah Penduduk	Angka Penyandang Cacat
	Laki-laki	Perempuan	L+P		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
0-4	7	6	13	38.761	0,03
5-9	22	15	37	43.934	0,08
10-14	54	45	99	45.366	0,22
15-19	67	53	120	43.318	0,28
20-24	79	47	126	40.888	0,31
25-29	70	47	117	43.299	0,27
30-34	80	61	141	51.017	0,28
35-39	83	59	142	46.611	0,30
40-44	68	53	121	43.709	0,28
45-49	82	37	119	40.848	0,29
50-54	75	42	117	36.935	0,32
55-59	55	46	101	29.872	0,34
60-64	26	32	58	21.191	0,27
65-69	35	19	54	13.237	0,41
70-74	24	18	42	10.596	0,40
>75	24	43	67	14.077	0,48
Jumlah	851	623	1.474	563.659	0,26

Sumber: Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, (2013)

Angka penduduk penyandang cacat di Kota Surakarta sebesar 0,26 persen. Artinya bahwa sebagian kecil penduduk Kota Surakarta menyandang cacat. Namun ini tetap menjadi perhatian pemerintah kota untuk tetap memberikan pelayanan sosial bagi mereka. Indikator ini berguna untuk menyusun kebijakan pemerintah dalam pengembangan pelayanan bagi penduduk penyandang cacat menurut jenis kecacatannya.

2.1.4.2. Penduduk Menurut Karakteristik Sosial

A. Komposisi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan

Tingkat pendidikan merupakan salah satu ukuran untuk kualitas penduduk. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan semakin baik kualitas SDM di wilayah tersebut. Namun ukuran ini masih harus ditambah dengan etos kerja dan ketrampilan baik *hard skill* maupun *soft skill*. Beberapa pelaku usaha menyatakan bahwa yang dibutuhkan tidak saja ketrampilan tetapi juga kepribadian, karena ketrampilan bisa ditingkatkan melalui pelatihan-pelatihan. Tamat sekolah didefinisikan sebagai jenjang pendidikan yang telah berhasil diselesaikan oleh seseorang dengan dibuktikan adanya ijazah atau surat tanda tamat belajar. Tetapi jika menggunakan ukuran menurut jenjang tertinggi merupakan jenjang atau kelas tertinggi yang pernah ditempuh oleh seseorang.³¹

³¹ "Penduduk Sosial" - <http://dispendukcapil.surakarta.go.id/20XIV/index.php/en/2014-05-21-04-43-06/2014-05-21-08-47-11/kuantitas-penduduki/item/67-penduduk-sosial>. Diunduh 7 Maret 2017. Pukul 10.36 WIB.

Tabel 2.4
Distribusi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang
Ditamatkan dan Jenis Kelamin, Kota Surakarta, Tahun 2013

Jenjang Pendidikan	Laki-Laki		Perempuan		Jumlah	
	n (jiwa)	%	n (jiwa)	%	n (jiwa)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Tidak/Belum Sekolah	41.575	14,92	43.160	15,14	84.735	15,03
Belum Tamat SD/Sederajat	31.448	11,29	32.729	11,48	64.177	11,39
Tamat SD/Sederajat	36.425	13,07	47.501	16,67	83.926	14,89
SLTP/Sederajat	43.048	15,45	42.660	14,97	85.708	15,21
SLTA/Sederajat	86.056	30,88	80.648	28,30	166.704	29,58
Diploma I/II	1.520	0,55	2.016	0,71	3.536	0,63
Akademi/Diploma III/SARMUD	11.161	4,01	11.841	4,15	23.002	4,08
Diploma IV/Strata I	24.547	8,81	22.630	7,94	47.177	8,37
Strata II	2.713	0,97	1.777	0,62	4.491	0,80
Strata III	151	0,05	53	0,02	203	0,04
Jumlah	278.644	100,00	285.015	100,00	563.659	100,00

Sumber: Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, (2013)

Tabel 2.5 menunjukkan bahwa tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan penduduk Kota Surakarta relatif cukup tinggi. Hampir sepertiga penduduk Kota Surakarta (29,58 persen) tamat SLTA/Sederajat. Jika dilihat menurut jenis kelamin, persentase penduduk laki-laki yang tamat SLTA/ sederajat lebih tinggi dibandingkan penduduk perempuan. Permintaan pasar tenaga kerja yang mensyaratkan minimal pendidikan SLTA, menyebabkan penduduk berusaha untuk mencapai jenjang pendidikan tersebut untuk bisa masuk ke pasar kerja non pertanian.

Sedangkan persentase penduduk yang tamat SLTP untuk perempuan hampir sama dengan persentase penduduk laki-laki. Pada jenjang pendidikan dasar, proporsi penduduk yang tamat SD untuk penduduk perempuan lebih tinggi daripada penduduk laki-laki. Ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pendidikan,

semakin sedikit perempuan yang berhasil menamatkan pendidikannya. Hal ini sama dengan gambaran pendidikan nasional, dimana angka melanjutkan sekolah ke jenjang pendidikan perempuan lebih rendah dibanding laki-laki, terutama pada kelompok penduduk miskin.

B. Komposisi Penduduk Menurut Status Perkawinan dan Rata-rata Umur Kawin Pertama

Informasi tentang struktur perkawinan penduduk pada waktu tertentu berguna bagi para penentu kebijakan dan pelaksana program kependudukan. Terutama dalam hal pembangunan keluarga, kelahiran dan upaya-upaya peningkatan kualitas keluarga. Dari informasi penduduk berstatus kawin, Umur Perkawinan Pertama, dan lama kawin akan berguna untuk mengestimasi angka kelahiran yang akan terjadi.

Tabel 2.5
Distribusi Penduduk Menurut Status Kawin, Jenis Kelamin, dan Kecamatan, Kota Surakarta, Tahun 2013

Jenis Kelamin /Kecamatan	Status Kawin								Jumlah Total	
	Belum Kawin		Kawin		Ceraai		Ceraai Mati			
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Laki-laki (L)										
Laweyan	25.012	50,24	23.283	46,77	472	0,95	1.020	2,05	49.787	100,00
Serengan	13.393	50,20	12.309	46,13	334	1,25	645	2,42	26.681	100,00
Pasarkliwon	21.796	51,10	19.537	45,81	452	1,06	866	2,03	42.651	100,00
Jebres	35.637	49,87	33.656	47,10	698	0,98	1.465	2,05	71.456	100,00
Banjarsari	44.865	50,94	40.679	46,19	830	0,94	1.695	1,92	88.069	100,00
Kota Surakarta	140.703	50,50	129.464	46,46	2.786	1,00	5.691	2,04	278.644	100,00
Perempuan (P)										
Laweyan	22.158	42,99	23.918	46,41	892	1,73	4.569	8,87	51.537	100,00
Serengan	11.679	42,23	12.706	45,95	477	1,72	2.791	10,09	27.653	100,00
Pasarkliwon	18.199	42,36	20.036	46,64	701	1,63	4.022	9,36	42.958	100,00
Jebres	31.167	42,97	34.159	47,09	1.232	1,70	5.981	8,25	72.539	100,00
Banjarsari	38.957	43,13	42.141	46,65	1.463	1,62	7.767	8,60	90.328	100,00
Kota Surakarta	122.160	42,86	132.960	46,65	4.765	1,67	25.130	8,82	285.015	100,00
L + P										
Laweyan	47.170	46,55	47.201	46,58	1.364	1,35	5.589	5,52	101.324	100,00
Serengan	25.072	46,14	25.015	46,04	811	1,49	3.436	6,32	54.334	100,00
Pasarkliwon	39.995	46,72	39.573	46,23	1.153	1,35	4.888	5,71	85.609	100,00
Jebres	66.804	46,39	67.815	47,10	1.930	1,34	7.446	5,17	143.995	100,00
Banjarsari	83.822	46,99	82.820	46,42	2.293	1,29	9.462	5,30	178.397	100,00
Kota Surakarta	262.863	46,64	262.424	46,56	7.551	1,34	30.821	5,47	563.659	100,00

Sumber: Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, (2013)

Tabel 2.6 menyajikan komposisi penduduk menurut status kawin penduduk Kota Surakarta. Tabel tersebut menunjukkan bahwa penduduk Kota Surakarta didominasi oleh penduduk berstatus belum kawin yakni 46,64 persen. Bila dilihat menurut jenis kelamin, penduduk laki-laki lebih banyak yang berstatus belum menikah (50,50 persen) bila dibandingkan dengan perempuan (42,86 persen). Proporsi penduduk yang berstatus kawin hampir sama antara penduduk laki-laki dan perempuan, yaitu 46,46 persen untuk laki-laki dibandingkan dengan 46,65 persen untuk perempuan.

Tabel 2.6
Distribusi Penduduk Umur 10 Tahun ke Atas Menurut Kelompok
Umur dan Status Kawin, Kota Surakarta, Tahun 2013

Kelompok Umur	BELUM KAWIN		KAWIN		CERAI		CERAI MATI		Jumlah	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
10-14	45.366	25,18	0	0,00	0	0,00	0	0,00	45.366	9,43
15-19	42.997	23,86	296	0,12	2	0,02	23	0,06	43.318	9,01
20-24	34.495	19,15	5.931	2,37	51	0,52	411	1,01	40.888	8,50
25-29	21.119	11,72	20.532	8,21	398	4,03	1.250	3,07	43.299	9,00
30-34	12.832	7,12	35.201	14,07	883	8,95	2.101	5,16	51.017	10,61
35-39	7.656	4,25	35.554	14,21	1.077	10,92	2.324	5,71	46.611	9,69
40-44	5.160	2,86	34.920	13,96	1.111	11,26	2.518	6,18	43.709	9,09
45-49	3.725	2,07	32.780	13,10	1.194	12,10	3.149	7,73	40.848	8,49
50-54	2.557	1,42	29.346	11,73	1.156	11,72	3.876	9,51	36.935	7,68
55-59	1.719	0,95	22.634	9,05	1.043	10,57	4.476	10,99	29.872	6,21
60-64	1.157	0,64	14.847	5,93	783	7,94	4.404	10,81	21.191	4,41
65-69	588	0,33	7.982	3,19	617	6,25	4.050	9,94	13.237	2,75
70-74	413	0,23	5.301	2,12	592	6,00	4.290	10,53	10.596	2,20
>75	384	0,21	4.871	1,95	958	9,71	7.864	19,30	14.077	2,93
Jumlah	180.168	100,00	250.195	100,00	9.865	100,00	40.736	100,00	480.964	100,00

Sumber: Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, (2013)

Jika dikaitkan dengan umur nampak bahwa proporsi penduduk yang berstatus belum kawin pada kelompok umur 10-29 tahun cukup tinggi. Banyaknya proporsi penduduk muda yang belum kawin diduga disebabkan oleh

besarnya jumlah penduduk yang berada pada umur sekolah ditambah dengan mereka yang menunda perkawinan karena baru mulai masuk pasar kerja. Penduduk yang statusnya kawin terbanyak pada kelompok umur 30-54 tahun. Penduduk pada usia ini sudah menamatkan pendidikannya dan mulai mantap secara finansial sehingga memutuskan untuk melakukan pernikahan.

C. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kecacatan

Informasi tentang banyaknya penduduk penyandang cacat dan jenis kecacatannya sangat diperlukan dalam memberikan program pelayanan publik yang ramah penyandang cacat. Selama ini perhatian pemerintah dianggap kurang dan masih banyak perlakuan diskriminatif dalam pelayanan publik kepada kelompok ini. Berbagai kantor pelayanan publik belum ramah penyandang cacat terutama cacat fisik, bahkan untuk pelayanan administrasi kependudukan. Informasi jumlah penyandang cacat terutama cacat fisik dapat digunakan untuk dasar perencanaan pembangunan berbagai fasilitas umum yang ramah penyandang cacat, pelayanan fasilitas pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja dan lain sebagainya.

Tabel 2.7
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kecacatan dan Kecamatan, Kota Surakarta, Tahun 2013

Jenis Kecacatan	Laweyan	Serengan	Pasarkliwon	Jebres	Banjarsari	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Cacat fisik	70	32	57	104	131	394
Cacat netra/buta	24	10	22	50	44	150
Cacat rungu/wicara	34	16	39	64	82	235
Cacat mental/jiwa	51	36	64	83	111	345
Cacat fisik dan mental	13	11	4	22	25	75
Cacat lainnya	60	23	33	65	94	275
Jumlah	252	128	219	388	487	1.474

Sumber: Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, (2013)

Pada Tabel 2.8 terlihat bahwa jumlah penduduk penyandang cacat di Kota Surakarta tidak terlalu besar yaitu 1.474 jiwa, jika dibandingkan dengan jumlah seluruh penduduk Kota Surakarta yaitu 563.659 jiwa hanya 0,26 persen. Meskipun proporsinya kecil, penduduk penyandang cacat tetap harus menjadi perhatian pemerintah Kota Surakarta untuk tetap memberikan pelayanan sosial bagi mereka seperti pendidikan, kesehatan, dan fasilitas layanan umum lainnya. Penyandang cacat terbesar berada di Kecamatan Banjarsari yaitu 487 orang, diikuti Kecamatan Jebres yaitu 388 orang, dan terkecil berada di Kecamatan Serengan yaitu 128 orang.

Jika dikaitkan dengan jenis kelamin, maka penyandang cacat laki-laki lebih banyak daripada yang perempuan, yaitu 851 jiwa dibandingkan 623 jiwa. Sedangkan bila menurut jenis kecacatan maka cacat fisik adalah yang terbanyak yaitu sebesar 394 orang, diikuti cacat mental/jiwa yaitu 345 orang dan yang paling sedikit adalah cacat fisik dan mental sebanyak 75 orang.

Tabel 2.8
Jumlah Penyandang Cacat Menurut Jenis Kecacatan dan Jenis Kelamin,
Kota Surakarta, Tahun 2013

Jenis Kecacatan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
Cacat fisik	232	162	394
Cacat netra/buta	78	72	150
Cacat rungu/wicara	125	110	235
Cacat mental/jiwa	224	121	345
Cacat fisik dan mental	45	30	75
Cacat lainnya	147	128	275
Jumlah	851	623	1.474

Sumber: Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, (2013)

2.1.4.3. Administrasi Kependudukan

1. Kepemilikan Akta

Akta merupakan dokumen kependudukan yang sangat penting dan wajib dimiliki oleh semua penduduk di Indonesia. Akta merupakan pengakuan negara atas status keperdataan seseorang baik dalam hubungan kekeluargaan maupun dalam hubungannya dengan pelayanan legal lainnya. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan akta-akta meliputi akta kelahiran, akta pengakuan anak, akta pengesahan anak, akta kematian, akta perkawinan dan akta perceraian.³²

Tabel 2.9
Jumlah Pelayanan Menurut Jenisnya, Kota Surakarta, Tahun 2012 dan 2013

Jenis	2012	2013
(1)	(2)	(3)
Kelahiran	9.538	9.301
Kematian	891	1.336
Perkawinan	1.048	963
Perceraian	100	137
Pengakuan Anak	3	22
Pengesahan Anak	2	24

Sumber: Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, (2013)

Tabel 2.10 menggambarkan jumlah pelayanan akta yang dilakukan Dinas menurut jenis pelayanannya, yaitu : akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, akta perceraian, akta pengakuan anak dan akta pengesahan anak. Akta kelahiran yang diterbitkan pada 2013 sedikit menurun dari tahun 2012 dengan selisih 237 akta. Penerbitan akta kematian mengalami peningkatan yang

³² “Kepemilikan Akta” - <http://dispendukcapil.surakarta.go.id/20XIV/index.php/en/2014-05-21-04-43-06/2014-05-21-08-47-11/kepemilikan-dok/item/73-milik-akta>. Diunduh 7 Maret 2017. Pukul 10.36 WIB.

cukup signifikan hingga hampir dua kali lipat yaitu dari 891 akta pada tahun 2012 menjadi 1.336 akta pada 2013.

Penerbitan akta perkawinan pada 2013 agak menurun jumlahnya yaitu dari 1.048 akta pada 2012 menjadi 963 akta pada 2013. Sedangkan untuk akta pengakuan dan pengesahan anak ternyata meningkat dengan pesat. Penerbitan akta pengakuan anak meningkat lebih dari tujuh kali lipat yaitu dari 3 akta pada 2012 menjadi 22 akta pada 2013. Penerbitan pengesahan anak juga meningkat hingga dua belas kali lipat yaitu dari 2 akta pada 2012 menjadi 24 akta pada 2013.

2. Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Kartu Tanda Penduduk (KTP) merupakan salah satu identitas legal bagi penduduk yang menjadi bukti bahwa orang tersebut diakui sebagai penduduk di suatu wilayah administrasi di Indonesia. Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2006, KTP wajib dimiliki oleh semua penduduk di Indonesia yang sudah berumur 17 tahun ke atas atau mereka yang berumur di bawah 17 tahun tetapi sudah kawin atau sudah pernah kawin, dalam profil ini disebut penduduk wajib KTP. Sejak tahun 2010 KTP manual diganti secara bertahap dengan KTP elektronik.³³

³³ “Kepemilikan KTP” - <http://dispendukcapil.surakarta.go.id/20XIV/index.php/en/2014-05-21-04-43-06/2014-05-21-08-47-11/kepemilikan-dok/item/72-kepemilikan-katepe>. Diunduh 7 Maret 2017. Pukul 10.36 WIB.

Tabel 2.10
Jumlah dan Persentase Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik,
Kota Surakarta, Tahun 2013

Kecamatan	n Wajib KTP			n Penduduk Yang Memiliki KTP EI			% Kepemilikan KTP EI
	Laki-laki	Perempuan	L+P	Laki-laki	Perempuan	L+P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(11)
Laweyan	36.667	38.974	75.641	31.668	34.118	65.786	86,97
Serengan	19.690	20.944	40.634	17.295	18.635	35.930	88,42
Pasarkliwon	31.080	32.084	63.164	26.980	28.426	55.406	87,72
Jebres	52.850	54.509	107.359	46.890	49.188	96.078	89,49
Banjarsari	64.070	67.620	131.690	55.745	59.866	115.611	87,79
Kota Surakarta	204.357	214.131	418.488	178.578	190.233	368.811	88,13

Sumber: Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, (2013)

Sejalan dengan pelaksanaan program KTP Elektronik maka seluruh wajib KTP akan mendapatkan KTP Elektronik. Tabel 2.11 menampilkan kepemilikan KTP Elektronik penduduk Kota Surakarta. Menurut tabel tersebut dapat diketahui bahwa dari 418.488 jiwa wajib KTP, 88,13 persennya (368.811 jiwa) sudah memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik, sedangkan sisanya masih dalam proses.

3. Kepemilikan Kartu Keluarga (KK)

Kartu Keluarga (KK) adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga. Kartu Keluarga merupakan salah satu dari beberapa dokumen kependudukan yang wajib dimiliki oleh keluarga. Kartu keluarga menunjukkan hubungan kekerabatan antara kepala keluarga dengan anggota keluarganya.³⁴

³⁴ “Kepemilikan KK” - <http://dispendukcapil.surakarta.go.id/20XIV/index.php/en/2014-05-21-04-43-06/2014-05-21-08-47-11/kepemilikan-dok/item/71-kepemilikan-kk>. Diunduh 7 Maret 2017. Pukul 10.36 WIB.

Tabel 2.11
Jumlah dan Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga, Kota Surakarta,
Tahun 2013

Kecamatan	n Keluarga	n Keluarga yang memiliki KK	n Keluarga yang tidak memiliki KK	% Keluarga yang memiliki KK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Laweyan	29.895	29.895	0	100,00
Serengan	16.686	16.686	0	100,00
Pasarkliwon	25.058	25.058	0	100,00
Jebres	43.179	43.179	0	100,00
Banjarsari	52.053	52.053	0	100,00
Kota Surakarta	166.871	166.871	0	100,00

Sumber: Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, (2013)

2.1.5. Pendidikan

Menurut Data Pokok Pendidikan (Dapodik) pada tahun ajaran 2010/2011 terdapat 68.153 siswa dan 869 sekolah di Surakarta, dengan rincian: 308 TK/RA, 292 SD/MI, 97 SMP/MTs, 56 SMA/MA, 46 SMK, 54 PT, dan 16 sekolah lain. Di Surakarta terdapat dua universitas besar, yaitu Universitas Sebelas Maret (UNS), Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), keduanya termasuk kategori 50 universitas terbaik di Indonesia. Demikian pula terdapat Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta dan Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta. Selain itu terdapat 52 universitas swasta lainnya seperti Unisri (Universitas Slamet Riyadi), Universitas Tunas Pembangunan, Universitas Setia

Budi, STIKES Muhammadiyah, Universitas Islam Batik, dll. Surakarta juga kini menjadi tempat tujuan studi para lulusan SMA dari seluruh Indonesia.³⁵

2.1.5.1. Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta (BPMKS)

BPMKS merupakan bantuan pendidikan yang diperuntukan bagi:³⁶

1. Siswa Warga Kota Surakarta dari keluarga mampu yang bersekolah di Kota Surakarta pada jenjang SD/MI, SMP/MTs Negeri.
2. Siswa Warga Kota Surakarta dari keluarga mampu yang bersekolah di Kota Surakarta pada Jenjang SDLB, SMPLB dan SMALB.
3. Siswa warga Kota Surakarta dari keluarga tidak mampu yang bersekolah di Kota Surakarta jenjang SD/MI/SDLB Negeri/Swasta, SMP/MTs/SMPLB Negeri/swasta, SMA/MA/SMK/SMALB Negeri/Swasta.
4. Siswa warga Kota Surakarta dari keluarga tidak mampu yang bersekolah pada sekolah PLUS jenjang SD, SMP dan SMK Kota Surakarta.
5. Siswa warga Kota Surakarta yang yang tidak bersekolah, tetapi masih dalam usia sekolah jenjang SD, SMP dan SMK.

BPMKS dibagi menjadi 3 jenis kartu kategori yaitu silver, gold dan platinum:

1. Kartu BPMKS Silver

Kriteria Siswa yang dapat menerima :

- Siswa Warga Surakarta dari warga mampu yang bersekolah di kota Surakarta pada jenjang SD/MI Negeri, SMP/MTs Negeri.

³⁵ "Kota Surakarta"... *op.cit.*

³⁶ "Info Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta" - <http://surakarta.go.id/konten/info-bantuan-pendidikan-masyarakat-kota-surakarta>. Diunduh 7 Maret 2017. Pukul 11.09 WIB.

- Siswa Warga Surakarta dari keluarga mampu yang bersekolah di kota Surakarta jenjang SDLB, SMPLB, dan SMALB Negeri/Swasta.

2. Kartu BPMKS Gold

Kriteri yang dapat menerima:

- Siswa warga kota Surakarta dari keluarga tidak mampu yang bersekolah di kota Surakarta jenjang SD/MI/SDLB Negeri/Swasta, SMP/MTs/SMPLB Negeri/Swasta, SMA/MA/SMALB Negeri/Swasta.

3. Kartu BPMKS Platinum

Kriteri Siswa yang dapat menerima:

- Siswa Warga kota Surakarta dari keluarga yang tidak mampu yang bersekolah pada sekolah PLUS jenjang SD, SMP, dan SMK kota Surakarta.
- Siswa Warga kota Surakarta yang tidak bersekolah, tetapi masih dalam usia sekolah jenjang SD, SMP, dan SMK serta yang akan melanjutkan ke Sekolah Plus.

2.2. Gambaran Umum Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Surakarta

Gambar 2.2
Lambang KPU Kota Surakarta



KOTA SURAKARTA

Sumber: KPU Kota Surakarta, (2017)

Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta adalah salah satu lembaga Negara yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Pemilu di Indonesia, khususnya penyelenggaraan Pemilu di daerah Kota Surakarta. Pemilu tersebut meliputi Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.

2.2.1 Profil Organisasi

- A. Nama: Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta
- B. Alamat: Jalan Kahuripan Utara No. 23, Sumber, Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57138

C. Visi:

“Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

D. Misi:

1. Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum;
2. Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif, dan beradab;
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersih, efisien, dan efektif;
4. Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan Pemilihan Umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilihan Umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.

E. Tugas dan Wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu menjabarkan Tugas dan Wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota sebagai berikut: Merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan bupati/walikota; menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan bupati/walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi; menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan gubernur serta pemilihan bupati/walikota dalam wilayah kerjanya; mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi; menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota; memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau

pemilihan gubernur dan bupati/walikota terakhir dan menetapkan sebagai daftar pemilih; menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi; menetapkan calon bupati/walikota yang telah memenuhi persyaratan; menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan bupati/walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan; membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi; menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil pemilihan bupati/walikota dan mengumumkannya; mengumumkan calon bupati/walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya; melaporkan hasil pemilihan bupati/walikota kepada KPU melalui KPU Provinsi; menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan; mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati,

dan walikota dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat; melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi; melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota; menyampaikan hasil pemilihan bupati/walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Menteri Dalam Negeri, bupati/walikota, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; dan melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2.2. Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2015

Merupakan tantangan bagi KPU Kota Surakarta dan *stakeholder* dalam mewujudkan harapan Pemilukada tahun 2015 yang aman dan sukses. Pemilukada Kota Surakarta tahun 2015 merupakan simbol pertarungan politik primordial pemimpin Indonesia. Dari Surakarta Ir. H. Joko Widodo menuju DKI Jakarta dan saat ini menjabat sebagai Presiden RI ke-7 (tujuh), masyarakat mengetahui bahwa beliau adalah orang Surakarta. Sehingga kesuksesan Pemilukada tahun 2015 turut andil dalam menjaga marwah presiden RI ke-7 (tujuh) yang notabene mantan Walikota dan juga orang Surakarta tersebut.

Dalam mewujudkan kesuksesan Pemilukada tahun 2015 perlu adanya komitmen bagaimana mewujudkan Pemilukada yang berintegritas dan harus dimulai dengan membangun sikap yang positif. Membangun sikap positif berarti

berkomitmen bersama dalam sebuah “*brand identity*”, dan “Solo Kota Ramah Demokrasi” menjadi pilihan kata yang paling bijak. Selain sebagai *tagline* identitas kota, Solo Ramah Demokrasi juga merupakan salah satu bentuk komunikasi politik.

Solo Ramah Demokrasi diharapkan bukan hanya menjadi sebuah “*brand*” ataupun “*brand image*” yang berhenti pada momen Pemilukada saja, tetapi juga mendatangkan manfaat sebagai *brand equity* Solo pada masa yang akan datang. Solo Ramah Demokrasi memiliki pengaruh yang positif dalam membangun identitas kota yang damai, egaliter, plural, dan harmoni. Prototype Solo Ramah Demokrasi berhasil dan berdayaguna yang dibangun melalui 17 pilar indikator sukses yaitu:³⁷Solo ramah terhadap penegakan hukum dan keadilan; Solo ramah terhadap pergantian kepemimpinan secara procedural; Solo ramah terhadap kepemimpinan yang rereh, ririh, sumeh, sumeleh, dan bertanggung jawab; Solo ramah terhadap kebebasan pers, komunikasi politik yang santun, cerdas dan mencerdaskan; Solo ramah terhadap penyelenggaraan Pemilu yang profesional dan berintegritas; Solo ramah terhadap netralitas politik penyelenggara Negara dalam pemilihan; Solo ramah terhadap partisipasi politik, partisipasi partai politik dan hasil pemilu yang berkualitas; Solo ramah terhadap gerakan anti kampanye hitam dan *money politics*; Solo ramah terhadap kebebasan berkumpul, berserikat secara bertanggung jawab dan berbudaya; Solo ramah terhadap penyampaian aspirasi dan pendapat yang tidak anarkhis dan akuntabel; Solo ramah terhadap jaminan hak dasar dan pelayanan yang aksesibilitas bagi

³⁷ Agus Sulistyio dkk, *op.cit.*, hlm. 2-30.

kaum disabilitas; Solo ramah terhadap perbedaan pilihan dan menghargai hak politik warga; Solo ramah terhadap perbedaan agama dan keyakinan serta kebebasan menjalankan ibadah; Solo ramah terhadap tindakan anti kekerasan dan ancaman; Solo ramah terhadap perbedaan gender dan tindakan yang tidak diskriminatif; Solo ramah terhadap keluhan dan aduan masyarakat lintas golongan dan strata sosial; Solo ramah terhadap budaya tertib dan santun.

A. Penyelenggaraan

Pemilukada serentak gelombang pertama dilaksanakan pada hari rabu, 9 Desember 2015. Gelombang ini untuk mengakomodir kepala daerah dan wakil kepala daerah yang akan atau telah memasuki akhir masa jabatan tahun 2015 dan semester pertama tahun 2016. Kota Surakarta menjadi salah satu dari sekian daerah yang menyelenggarakan Pemilukada serentak. Tercatat ada 264 daerah yang telah menyelenggarakan Pemilukada serentak pada tanggal 9 Desember 2015 yang terdiri dari 8 provinsi, 221 kabupaten dan 35 kota di Indonesia.

Pada Pemilukada serentak ini, KPU kembali mengusung semangat keterbukaan informasi. Keterbukaan atau transparansi merupakan salah satu tolok ukur dari kualitas penyelenggaraan pemilihan. Keterbukaan tidak hanya sebatas pada hasil akhir perolehan tetapi juga transparan dalam proses pelaksanaan setiap tahapan. Tahapan setiap prosesnya dapat dipantau melalui aplikasi SITAP (Sistem Informasi Tahapan Pemilihan), tahapan pencalonan melalui aplikasi SILON (Sistem Informasi Pencalonan), tahapan pemutakhiran data pemilih dengan aplikasi SIDALIH (Sistem Informasi

Pemutakhiran Data Pemilih), proses penghitungan suara hasilnya langsung dilakukan scan C-1 dan langsung diunggah melalui web KPU Kota Surakarta: www//Pemilukada2015.kpu.go.id/surakartakota.³⁸

B. Pasangan Calon dan Partai Politik Pendukung

KPU Kota Surakarta menetapkan, mengundi, dan mengumumkan sejumlah dua pasang calon peserta pemilihan dalam Pemilukada Surakarta 2015 pada tanggal 24-25 Agustus 2015. Pasangan calon nomor urut 1 (satu) yaitu: Drs. H. Anung Indro Susanto, MM-Muhammad Fajri (Anung-Fajri) yang diusung oleh gabungan 4 partai politik yang memperoleh 15 kursi, yaitu Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 5 kursi, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) 3 kursi, partai Demokrat 3 kursi dan Partai Amanat Nasional (PAN) 4 kursi. Keempat partai pengusung menamakan diri Koalisi Solo Bersama (KSB).

Pasangan calon nomor urut 2 (dua) adalah F.X. Hadi Rudyatmo-Dr. H. Achmad Purnomo, Apt. (Rudy-Purnomo) yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) yang memperoleh 24 kursi. Selain diusung oleh PDIP, Rudy Purnomo juga didukung oleh Partai Nasdem, Partai Hanura, Partai Golkar hasil Munas Jakarta (Versi Agung Laksono) dan PPP Munas Jakarta (Jan Fariz) dan PKB. Sedangkan pasangan calon Anung-Fajri selain diusung oleh gabungan 4 partai politik Koalisi Solo

³⁸ *Ibid.*, hal. 56.

Bersama, juga didukung oleh Partai Golkar Hasil Munas Bali (Aburizal Bakri/Ical), PPP hasil Munas Surabaya (Versi Rohmanurmuzi) dan PKB.³⁹

C. Sosialisasi dan Pemutakhiran Data Pemilih

Dalam proses sosialisasi pada Pemilu pada serentak di Surakarta tahun 2015 yang lalu, KPU Kota Surakarta melakukan segmentasi dengan beberapa pendekatan pemilih dengan berbasis komunitas. Mengajak masyarakat dari berbagai segmentasi untuk bersama melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang bertujuan untuk menggerakkan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum. Dalam implementasinya agar lebih efektif bergerak melakukan sosialisasi sampai dengan akar rumput segmen pemilih, KPU Kota Surakarta membentuk Tim Penggerak Partisipasi atau yang dikenal sebagai “Tim Gerak Pasti”. Tim tersebut dibentuk dari berbagai segmentasi berbasis komunitas masyarakat, mulai dari segmen pemilih perempuan, pemilih disabilitas, pemilih segmen keagamaan, pemilih marginal dan segmen pemilih pemula.⁴⁰

Respon partisipasi politik dari beberapa organisasi, paguyuban, kelompok masyarakat dan komunitas cukup tinggi dibandingkan dengan daerah lainnya, baik secara kuantitatif maupun kualitas. Munculnya kepedulian beberapa lembaga masyarakat, paguyuban, kelompok masyarakat, pegiat LSM, komunitas, bahkan merebaknya “relawan” yang berperan aktif dalam sosialisasi terhadap penguatan dan advokasi masyarakat menunjukkan adanya peningkatan kualitas pelaku (subjek), objek sosialisasi (masyarakat)

³⁹ *Ibid.*, hal. 137-138.

⁴⁰ *Ibid.*, hal. 89.

sekaligus sebagai penerima manfaat informasi. Sebagai contoh adalah organisasi perempuan seperti PKK secara berjenjang dari tingkat RW dan Kelurahan hingga tingkat Kota, Sosialita, Yayasan Solo Mengajar, dan lainnya yang berpartisipasi aktif menghadirkan kedua pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota untuk memaparkan visi dan misinya di lingkungan kegiatan. Selain dari Tim Gerak Pasti, sosialisasi juga dilakukan pada saat Car Free Day, ada juga yang dalam bentuk Karnaval Budaya, Ngamen Pemilukada, dan melakukan Seminar Politik.

Selain melakukan sosialisasi, KPU juga memiliki tugas untuk memutakhirkan data pemilih. Ketentuan yang harus dipatuhi sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih dalam menyusun daftar pemilih tiap TPS, bahwa jumlah tiap TPS tidak boleh melebihi 800 (delapan ratus) pemilih dengan memperhatikan: (1) tidak menggabungkan kelurahan, (2) memudahkan pemilih, (3) Hal-hal yang berkenaan dengan geografis, (4) jarak dan waktu tempuh menuju TPS.

Dari hasil pemetaan DP4 oleh PPS menghasilkan Daftar Pemilih berbasis TPS. Kota Surakarta sendiri ada 999 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan) TPS di wilayah administrasi RT/RW. Setelah dihitung dalam pemetaan DP4 daftar pemilih sejumlah 422.502 pemilih. Untuk mengakomodir hak konstitusi warga Negara yang sedang bermasalah hukum, KPU menyusun daftar pemilih di Rumah Tahanan Kelas 1 A dengan jumlah pemilih laki-laki 219 pemilih dan perempuan 19 pemilih, sehingga jumlah TPS di Surakarta menjadi 1000 (seribu).

DP4 menjadi dasar pencocokan dan penelitian (coklit) pemutakhiran PPDP di TPS wilayah kerja masing-masing. Setelah PPDP melakukan coklit, DP4 dimutakhirkan menjadi DPS sejumlah 401.897 Pemilih, atau dapat dikatakan bahwa selama proses coklit di lapangan PPDP telah mencoret sejumlah 20.605 pemilih. Masa kerja PPDP dibatasi selama 36 (tiga puluh enam) hari. Beban kerja PPS menjadi lebih berat, setelah masa kerja PPDP habis. PPS harus turun kelapangan untuk menindaklanjuti masukan masyarakat tanpa bantuan PPDP.

Siding Pleno DPT tanggal 2 November 2015 di kantor KPU Kota Surakarta, diwarnai dengan masukan dari Tim Kampanye Pasangan Calon nomor 1 terkait dengan masih adanya data ganda. PPK dan PPS memutakhirkan data ganda sejumlah 1.982 pemilih yang disaring dari SIDALIH. Sehingga hasil perbaikan yang semula sejumlah 401.897 pemilih, menjadi 399.915 pemilih, yang selanjutnya ditetapkan sebagai DPT.⁴¹

Tabel 2.12
Daftar Pemilih Tetap Pemilukada Kota Surakarta 2015

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Pemilih Pemula			Difabel				
				L	P	L + P	L	P	L + P	1	2	3	4	5
1.	Banjarsari	13	327	60.534	64.906	125.440	1.561	1.712	3.273	94	33	66	89	56
2.	Jebres	11	256	50.244	52.250	102.494	1.234	1.306	2.540	66	42	51	63	47
3.	Laweyan	11	171	34.485	37.237	71.722	879	834	1.713	71	19	23	74	47
4.	Pasarkliwon	9	150	30.203	31.092	61.295	708	715	1.423	36	14	34	44	26
5.	Serengan	7	96	18.849	20.115	38.964	453	467	920	23	7	9	33	18
Total		51	1.000	194.315	205.600	399.915	4.835	5.034	9.869	290	115	183	303	194

Sumber: Data KPU Kota Surakarta, (2015)

D. Partisipasi Pemilih

Partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum menjadi salah satu dari sekian indikator sukses tidaknya penyelenggaraan pemilihan umum. Partisipasi masyarakat berarti keterlibatan masyarakat dalam pemilihan

⁴¹ *Ibid.*, hal. 120.

umum pada setiap tahapan dalam segala tingkatan, mulai dari pengawas, pemantau, badan penyelenggara, menjadi kontestan, atau bersedia hadir di TPS menggunakan hak pilihnya secara benar dan bertanggung jawab dalam proses pemungutan suara. Partisipasi masyarakat dengan bersedia hadir dan menggunakan hak pilihnya secara benar berarti semakin menguatkan kualitas hasil proses demokrasi. Jumlah seluruh suara sah dan tidak sah adalah untuk mengetahui tingkat partisipasi pemilih dalam pemilihan umum. Tingkat kehadiran atau partisipasi inilah yang menjadi angka politis sebagai parameter apakah pemilihan umum dikatakan berhasil atau tidak.

Pada Pemilukada tahun 2015 lalu, angka partisipasi masyarakat sebesar 73,6%. Meskipun angka partisipasi tidak mencapai target nasional sebesar 77,5%⁴², tingkat partisipasi tersebut masih lebih tinggi dibandingkan dengan Pemilukada langsung tahun 2010 dimana saat itu Jokowi-Rudy terpilih kembali untuk periode dua. Angka partisipasi 73,68% telah menghantarkan pelaksanaan Pemilukada serentak di Surakarta memperoleh apresiasi sebagai proses penyelenggaraan, persiapan dan pasca pemilihan yang patut dicontoh sehingga masuk sebagai peringkat 5 (lima) besar perolehan partisipasi se Jawa Tengah pada Pemilukada serentak tahun 2015.

Untuk partisipasi pemilih kaum difabel, dari 1.085 pemilih hanya 415 saja yang menggunakan hak pilihnya atau sekitar 38,25%. Angka tersebut jauh dari harapan KPU Kota Surakarta yang menargetkan angka partisipasi pemilih kaum difabel mencapai 75%. Angka tersebut juga jauh dari tingkat

⁴² *Ibid.*, hal. 83.

partisipasi secara umum yang mencapai 73,68% dan target nasional yang mencapai 77,5%.

E. Rekapitulasi dan Hasil

Rekapitulasi di Kota Surakarta dilaksanakan tanggal 17 Desember 2015 di *The Sunan Hotel* pukul 10.00 WIB. Acara dihadiri oleh Muspida, Panwaslih, Saksi PPK, Panwascam, dan tamu undangan lain. Acara berlangsung lancar dimulai dari pembacaan sesuai urutan dari Kecamatan Laweyan, Kecamatan Serengan, Kecamatan Pasarkliwon, Kecamatan Jebres, dan Kecamatan Banjarsari.

Semua hasil rekapitulasi di lima kecamatan yang dibacakan KPU sama persis tidak ada perbedaan dengan perolehan hasil yang dipegang oleh saksi maupun panwaslih, sehingga proses rekapitulasi hanya berlangsung sekitar 45 menit. Karena sebelumnya KPU telah menyediakan waktu lima hari untuk melaksanakan rekapitulasi di masing-masing kecamatan dari tanggal 10-15 Desember 2015 (Rekapitulasi di PPK). Berdasarkan hitung Form C1 rekapitulasi di KPU Kota Surakarta, perolehan masing-masing pasangan calon, informasi suara sah, tidak sah, dan pengguna hak pilih dan partisipasi pemilih dapat dilihat dalam tabel berikut:⁴³

⁴³ *Ibid.*, hal. 62.

Tabel 2.13
Rekapitulasi Data Pemilihan

Hasil Hitung TPS (FORM 1) Kota Surakarta				
1.	Drs. H. Anung Indro Susanto, M.M. dan Muhammad Fajri	111.462 Suara	39,61%	
2.	F.X. Hadi Rudyatmo dan Dr. H. Achmad Purnomo, Apt.	169.904 Suara	60,39%	
Pemilih dan Pengguna Hak Pilih				
		Laki-laki	Perempuan	Total
1.	Pemilih	185.397	196.148	398.126
2.	Pengguna Hak Pilih	130.303	148.784	293.341
3.	Partisipasi	70,28%	75,85%	73,68%
Suara Sah, Tidak Sah, dan Partisipasi Pemilih dengan Disabilitas				
1.	Suara Sah	280.155 Suara	95,70%	
2.	Suara Tidak Sah	12.879 Suara	4,30%	
3.	Pemilih Disabilitas	415 Pemilih	38,25%	

Sumber: Data KPU Kota Surakarta, (2015)

Pasangan calon F.X. Hadi Rudyatmo-Dr. H. Achmad Purnomo, Apt. (Rudy-Purnomo) yang diusulkan oleh PDIP berhasil memperoleh suara 60,39% sementara pasangan calon Drs. H. Anung Indro Susanto, MM-Muhammad Fajri (Anung-Fajri) yang diusulkan oleh PKS, Partai Gerindra, Partai Demokrat dan PAN memperoleh suara 39,61% dengan partisipasi pemilih mencapai 73,68%.